

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (SIPD RI)
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DI KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU**

Arifin Fardiansah

NPP. 32.0247

Asdaf Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu

Program Studi Keuangan Publik

Email: 32.0247@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Eko Budi Lestari, SE., MM

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The development of information technology has encouraged the government to integrate digital systems in regional financial management. Although Rejang Lebong Regency has implemented the SIPD RI since 2020 with a consecutive five-year WTP opinion, there are still technical and non-technical obstacles, such as limited features, lack of understanding among human resources, and slow system access. This requires an evaluation to assess the effectiveness of the SIPD RI implementation and efforts to address these barriers.*

Purpose: *To assess and analyze the effectiveness of the implementation of the Regional Government Information System of the Republic of Indonesia (SIPD RI) in financial management in Rejang Lebong Regency, Bengkulu Province.*

Method: *This study uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The analysis uses the effectiveness theory by Duncan in Steers (1985:53).*

Results: *The results of this study indicate that the Implementation of the Regional Government Information System of the Republic of Indonesia (SIPD RI) in Financial Management in Rejang Lebong Regency, Bengkulu Province has been running quite well, but there are still obstacles encountered in monitoring indicators, program and procedure suitability in the form of limited features in the system, suboptimal technical understanding of human resources, and slow system access.*

Conclusion: *The implementation of the Regional Government Information System of the Republic of Indonesia (SIPD RI) in financial management in Rejang Lebong Regency has been quite effective. However, improvements are needed, such as optimizing the development of internal Standard Operating Procedures (SOPs) to address the limitations of SIPD RI features, enhancing the technical understanding of human resources in using the system, and improving infrastructure and system accessibility to boost SIPD RI performance.*

Keywords: *Effectiveness, Financial Management, SIPD RI*

ABSTRAK

Rumusan Masalah/Latar Belakang (GAP): *Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah untuk mengintegrasikan sistem digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun Kabupaten Rejang Lebong telah mengimplementasikan SIPD RI sejak 2020 dengan capaian opini WTP selama lima tahun berturut-turut, masih ada kendala teknis dan non-teknis seperti keterbatasan*

fitur, kurangnya pemahaman SDM, dan lambatnya akses sistem. Hal ini memerlukan evaluasi untuk menilai efektivitas implementasi SIPD RI dan upaya mengatasi hambatan tersebut. **Tujuan:** Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam Pengelolaan Keuangan di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. **Metode:** Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis menggunakan teori Efektivitas dari Duncan dalam Steers (1985:53) **Hasil:** hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam pengelolaan Keuangan di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sudah berjalan cukup baik, tetapi masih terdapat hambatan yang ditemui dalam indikator monitoring, kesesuaian program dan prosedur berupa keterbatasan fitur dalam sistem, pemahaman teknis sumber daya manusia yang belum optimal, dan lambatnya akses sistem. **Kesimpulan:** Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam pengelolaan Keuangan di Kabupaten Rejang Lebong sudah berjalan cukup efektif, namun perlu ditingkatkan melalui seperti mengoptimalkan penyusunan SOP internal untuk mengatasi keterbatasan fitur SIPD RI, meningkatkan pemahaman teknis sumber daya manusia dalam penggunaan sistem, serta memperbaiki infrastruktur dan aksesibilitas sistem guna meningkatkan kinerja SIPD RI.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan Keuangan, SIPD RI

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi signifikan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk di Indonesia. Penerapan sistem digital dalam pengelolaan keuangan publik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Studi oleh Bernales-Vásquez dan Sánchez-Dávila (2025) menunjukkan bahwa digitalisasi manajemen keuangan publik secara global telah meningkatkan efisiensi dan kontrol dalam administrasi sumber daya negara, meskipun masih terdapat tantangan terkait integrasi teknologi dan kesiapan institusional. Hal ini sejalan dengan temuan Agostino, Arnaboldi, dan Lema (2022) yang menyatakan bahwa inovasi digital di sektor publik secara signifikan meningkatkan transparansi dan efisiensi, terutama dalam konteks open government dan digital budgeting.

Di Indonesia, implementasi e-government telah menjadi fokus utama dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik. Penelitian oleh Wijaya et al. (2024) menegaskan bahwa kebijakan e-government secara signifikan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan mempercepat proses layanan dan meningkatkan partisipasi publik. Kabupaten Rejang Lebong, sebagai bagian dari Provinsi Bengkulu, telah mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) sejak tahun 2020. Sistem ini dirancang untuk mendukung perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan daerah secara terintegrasi. Namun, studi oleh Arif dan Firmansyah (2024) mengidentifikasi bahwa meskipun SIPD RI memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi, masih terdapat kendala seperti keterbatasan fitur sistem, kurangnya pemahaman teknis SDM, serta lambatnya akses sistem yang mengganggu kinerja pengelolaan keuangan.

Lebih lanjut, penelitian oleh Hanifa et al. (2024) menyoroti bahwa transformasi digital

dalam administrasi pemerintahan, termasuk melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), secara signifikan meningkatkan aksesibilitas layanan publik dan transparansi manajemen fiskal. Temuan ini sejalan dengan studi Cordella dan Paletti (2019) yang menegaskan bahwa keberhasilan e-government sangat tergantung pada pemahaman struktural terhadap proses pemerintahan dan kapasitas institusional. Di sisi lain, Puron-Cid, Luna-Reyes, dan Gil-Garcia (2021) juga menekankan bahwa kesesuaian antara strategi digital dan kapasitas kelembagaan, termasuk pelatihan SDM dan kepemimpinan, sangat menentukan keberhasilan transformasi digital sektor publik. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas implementasi SIPD RI di Kabupaten Rejang Lebong menjadi penting untuk memastikan bahwa sistem ini benar-benar mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif. Penelitian Nurindahsari et al. (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan sistem informasi keuangan daerah di Pemerintah Kota Bandung sangat dipengaruhi oleh komitmen organisasi dan kualitas pelatihan SDM dalam pengelolaan teknologi e-government..

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di beberapa daerah di Indonesia, namun hasilnya belum menunjukkan efektivitas yang merata. Di beberapa daerah, SIPD berjalan dengan baik, sementara di daerah lain justru menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan fitur dan rendahnya kompetensi pegawai.

Hingga saat ini, belum ada penelitian yang secara khusus meneliti efektivitas penerapan SIPD RI dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Rejang Lebong. Padahal, daerah ini telah menerapkan SIPD RI sejak tahun 2020 dan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut. Namun, di lapangan masih ditemukan berbagai kendala, seperti lambatnya akses sistem, keterbatasan fitur, serta kurangnya pemahaman teknis aparatur.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keberhasilan administratif dengan kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan SIPD RI benar-benar efektif di Kabupaten Rejang Lebong, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya perbaikan yang telah dilakukan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).

Penelitian pertama oleh Muhammad Irfan Nasution dan Murwan (2021) yang berjudul Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. Dalam penelitian ini ditunjukkan bahwa BPKAD Kota Medan telah menggunakan aplikasi SIPD untuk menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah. SIPD digunakan dalam pengelolaan keuangan dan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas-tugas di bidang keuangan.

Penelitian kedua oleh Tumija, Asep Hendra, dan Marja Sinurat (2023) yang berjudul Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada BPKAD Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SIPD di Kota Semarang telah dilaksanakan, tetapi pada aspek sumber daya manusia

masih terdapat hambatan, khususnya dalam mengakses fitur Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan (Aklap) yang belum optimal meskipun telah tersedia dalam sistem.

Penelitian ketiga oleh Nidya Vitriana, Agustawan, dan Muhammad Ahyaruddin (2022) yang berjudul Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penerapan SIPD di BPKAD Pekanbaru belum berjalan secara efektif. Hambatan utama adalah sistem yang belum maksimal dalam mendukung pengelolaan informasi keuangan. Meski begitu, SIPD dinilai unggul karena cakupannya luas dan terintegrasi antar-OPD.

Penelitian keempat oleh Nanda Dias Ekasaputra (2021) yang berjudul Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Penyusunan Dokumen RKPD di Kabupaten Nganjuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SIPD dalam penyusunan dokumen RKPD belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal. Masih terdapat kendala teknis serta belum meratanya pemahaman SDM dalam mengoperasikan sistem tersebut.

Penelitian kelima oleh I Ketut Aditya Teken dan Arina Romarina (2024) yang berjudul Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagai Penunjang Kinerja Keuangan BPKAD Kota Denpasar Provinsi Bali. Penelitian ini mengungkap bahwa SIPD belum efektif mendukung kinerja keuangan daerah, terutama pada indikator target dan realisasi anggaran. Hal ini disebabkan karena proses pembuatan laporan belum sepenuhnya berbasis one system dan masih memerlukan aplikasi tambahan..

1.4 Pernyataan Kebaruan Karya Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang ditunjukkan melalui beberapa aspek pembeda yang signifikan dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut meliputi aspek tema atau fokus kajian, metode dan teori yang digunakan, konteks kebijakan daerah, karakteristik objek penelitian, serta temuan hasil yang lebih komprehensif. Kebaruan ini menjadi kekuatan utama penelitian untuk memperluas wawasan ilmiah mengenai implementasi kebijakan digital dalam tata kelola keuangan publik.

Pertama, dari sisi tema/topik, penelitian ini secara khusus mengevaluasi efektivitas penerapan SIPD RI dalam pengelolaan keuangan daerah, sedangkan beberapa penelitian sebelumnya hanya membahas penerapan SIPD dalam konteks perencanaan (RKPD) (seperti penelitian oleh Nanda Dias Ekasaputra, 2021), atau hanya terbatas pada aspek teknis akuntansi dan pelaporan (seperti Tumija et al., 2023). Penelitian ini lebih luas dan mendalam, karena menilai SIPD dari sisi keberhasilan mencapai tujuan pengelolaan keuangan secara menyeluruh, integrasi antarunit, serta adaptasi terhadap dinamika sistem digital, menjadikan fokusnya lebih strategis dan menyentuh akar masalah implementasi di tingkat kelembagaan.

Kedua, dari sisi metode dan teori, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teori efektivitas organisasi oleh Duncan dalam Steers (1985). Teori ini membagi efektivitas ke dalam tiga dimensi: goal attainment, integration, dan adaptation. Sebaliknya, penelitian sebelumnya umumnya hanya menggunakan pendekatan evaluatif umum atau tidak menyebutkan kerangka teori secara eksplisit, seperti terlihat dalam penelitian oleh I Ketut Aditya Teken dan Arina Romarina (2024) maupun oleh Ahmad Fauzan Alfarishi (2023). Dengan menggunakan teori yang kuat dan terstruktur, penelitian ini mampu menjelaskan efektivitas sistem secara sistemik dan proporsional.

Ketiga, dari segi konteks kebijakan dan karakteristik objek penelitian, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rejang Lebong, sebuah daerah yang telah menerapkan SIPD RI sejak 2020 dan secara administratif mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima tahun berturut-turut. Penelitian ini mengangkat kesenjangan antara capaian administratif dengan realitas implementasi di lapangan. Konteks ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di kota besar seperti Medan, Semarang, atau Denpasar, yang memiliki sumber daya dan infrastruktur teknologi lebih memadai. Rejang Lebong menjadi contoh daerah dengan tantangan khas daerah berkembang yang belum banyak diteliti, menjadikannya konteks kebijakan yang khas dan layak dijadikan model studi kasus.

Keempat, dari sisi hasil dan temuan, penelitian ini tidak hanya menemukan hambatan seperti keterbatasan fitur SIPD, kurangnya pemahaman teknis SDM, dan kendala akses sistem, tetapi juga secara aktif mengungkap upaya konkret kelembagaan seperti penyusunan SOP internal, pelatihan teknis, hingga penerapan mekanisme cadangan data manual. Temuan ini berbeda dari penelitian lainnya yang sebagian besar hanya menyoroti masalah tanpa mengeksplorasi solusi institusional. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi aplikatif, tidak hanya normatif, dan menjawab kebutuhan pemerintah daerah dalam menyempurnakan penerapan SIPD RI.

Kelima, penelitian ini juga menambahkan nilai pembeda dari sisi pendekatan lapangan, di mana pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap aktivitas teknis penginputan data keuangan, wawancara dengan aktor kunci di BPKD, serta dokumentasi berbasis praktik. Ini memberikan dimensi pengalaman empiris yang jarang muncul dalam penelitian berbasis survei atau analisis dokumen saja.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam Pengelolaan Keuangan di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Hambatan serta upaya yang dilakukan oleh BPKD dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Metode ini dipilih karena mampu menggali informasi secara komprehensif mengenai kondisi aktual di lapangan, hambatan yang dihadapi, serta strategi optimalisasi yang dilakukan oleh instansi terkait berdasarkan perspektif langsung dari para pelaku kebijakan dan pelaksana teknis.

Menurut Nurdin dan Hartati (2019:42), metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi kondisi objek secara alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dokumentasi, dan studi pustaka. Pendekatan ini relevan dalam penelitian ini karena permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD RI tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut aspek teknis, sumber daya manusia, dan kepatuhan terhadap regulasi yang saling

berkaitan.

Pemilihan metode ini juga didukung oleh pandangan Simangunsong (2017:190), yang menyatakan bahwa pendekatan kualitatif bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lapangan, termasuk perubahan informasi atau fenomena yang muncul selama proses pengumpulan data. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD RI, pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap realitas pelaksanaan sistem secara lebih utuh, baik dari sisi teknis implementasi maupun dampaknya terhadap efektivitas pengelolaan anggaran.

Selanjutnya, menurut Liamputtong (2020), metode kualitatif efektif untuk menggali pengalaman subjektif individu dalam konteks sosial tertentu melalui teknik seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan diskusi kelompok terfokus. Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman langsung dari aparatur pengelola keuangan di Kabupaten Rejang Lebong mengenai penggunaan dan pemanfaatan SIPD RI dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan mengacu pada pendapat Sugiyono (2016:225), yang meliputi: wawancara dengan pihak-pihak yang berperan langsung dalam proses pengelolaan keuangan melalui SIPD RI, observasi terhadap aktivitas penginputan dan pelaporan keuangan menggunakan sistem, dokumentasi terhadap regulasi, laporan keuangan, dan hasil audit, serta studi pustaka sebagai penguat data teoritis dan konseptual.

Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive, yaitu mereka yang memiliki kompetensi dan keterlibatan langsung dengan objek penelitian. Informan terdiri dari lima orang, yang mencakup pejabat struktural, operator SIPD RI, dan staf teknis pengelola keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Adapun lokasi penelitian dilakukan di kantor Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Penelitian ini dilaksanakan selama 20 hari, yaitu dari tanggal 6 Januari 2025 hingga 25 Januari 2025.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk Mengukur Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam Pengelolaan Keuangan di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Peneliti menggunakan teori Efektivitas oleh Duncan dalam Steers (1985: 53), terdapat 3 dimensi dalam efektivitas yaitu sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan dengan indikatornya Kurun waktu pencapaian, Target dan Realisasi anggaran, Dasar Hukum dan Strategi Pencapaian Tujuan.
2. Integrasi dengan indikatornya Prosedur dan Analisis perencanaan.
3. Adaptasi dengan indikatornya Sarana dan prasarana dan Monitoring Kesesuaian Program.

3.1 Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam Pengelolaan Keuangan

Dimensi pertama, yaitu pencapaian tujuan, memperlihatkan hasil yang cukup positif. Penggunaan SIPD RI telah berjalan secara penuh sejak tahun 2024, tanpa lagi bergantung pada aplikasi pendamping seperti SIMDA. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah mulai diinternalisasi dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Pelaporan realisasi anggaran juga telah sepenuhnya menggunakan platform SIPD RI, dengan monitoring triwulan yang dilakukan

secara berkala untuk memastikan target anggaran tercapai tepat waktu. Selain itu, penerapan SIPD RI di Kabupaten Rejang Lebong didukung oleh landasan hukum yang jelas, seperti Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, serta surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri. Komitmen kepala daerah juga terlihat dari instruksi Bupati yang mewajibkan seluruh perangkat daerah untuk mengintegrasikan kegiatan pengelolaan keuangan ke dalam SIPD RI. Meski demikian, strategi pencapaian tujuan masih kurang maksimal. Sosialisasi hanya dilakukan melalui video Youtube, dan kegiatan pelatihan formal kepada operator OPD masih sangat terbatas. Akibatnya, masih banyak pegawai yang mengalami kesulitan dalam memahami alur kerja sistem SIPD RI secara utuh.

Dimensi kedua, yaitu integrasi, menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan SIPD RI dari sisi keterpaduan antarunit kerja masih belum optimal. Prosedur penggunaan SIPD RI belum sepenuhnya tersosialisasi secara langsung dan menyeluruh kepada seluruh operator di masing-masing OPD. Koordinasi antarunit memang dilakukan, namun keterampilan teknis antarpegawai sangat beragam. Beberapa OPD kerap mengalami kendala dalam melakukan input data dengan benar, yang pada akhirnya harus dikoreksi oleh petugas BPKD. Petunjuk penggunaan sistem hanya disampaikan melalui video dan grup Whatsapp, tanpa adanya pelatihan teknis tatap muka atau pendampingan langsung yang sistematis. Hal ini mengakibatkan rendahnya keseragaman pemahaman dan praktik kerja dalam penggunaan SIPD RI. Meskipun secara struktur sistem SIPD RI sudah bersifat terpusat (one system), namun integrasi antarlini belum sepenuhnya terwujud karena lemahnya komunikasi formal dan bimbingan teknis yang berkelanjutan dari pusat maupun dari internal pemerintah daerah.

Dimensi terakhir adalah adaptasi. Dalam hal ini, Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan adanya upaya untuk beradaptasi dengan perubahan sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi. Monitoring dan rekonsiliasi rutin telah dilakukan oleh BPKD untuk memastikan kesesuaian antara data yang diinput dengan kondisi riil. Upaya adaptasi juga tercermin dari adanya koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Ditjen Keuangan Daerah guna menanggulangi kendala sistem. Namun demikian, tantangan teknis seperti gangguan akses pada sistem SIPD RI, khususnya pada jam-jam sibuk, serta keterbatasan kapasitas SDM dalam menghadapi perubahan teknologi masih menjadi hambatan besar. Banyak operator di OPD belum terbiasa bekerja menggunakan platform berbasis web secara intensif, sehingga dalam kondisi tertentu mereka tetap mengandalkan pencatatan manual sebelum melakukan input ke dalam sistem. Selain itu, tingginya ketergantungan terhadap bantuan helpdesk pusat menunjukkan bahwa daya adaptasi internal belum sepenuhnya terbentuk secara mandiri.

3.2 Hambatan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam Pengelolaan Keuangan

Dalam proses penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Rejang Lebong, ditemukan sejumlah hambatan teknis dan kelembagaan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya:

a. Keterbatasan Fitur dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia
Fitur dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dinilai masih belum fleksibel, terutama dalam mengakomodasi kebutuhan daerah yang bersifat dinamis, seperti revisi anggaran dan penyesuaian kegiatan. Kondisi tersebut menyebabkan proses perubahan

anggaran menjadi lebih lambat karena harus menunggu persetujuan dari pihak pusat. Prosedur ini tidak hanya memperlambat mekanisme administrasi, tetapi juga berdampak langsung terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan. Akibatnya, banyak kegiatan strategis daerah yang mengalami keterlambatan, sehingga memengaruhi serapan anggaran dan pencapaian target kinerja program.

b. Pemahaman teknis dari Sumber Daya Manusia belum optimal

Dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) di Kabupaten Rejang Lebong, masih terdapat kelemahan dalam hal pemahaman teknis aparatur, baik di tingkat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) maupun di Perangkat Daerah (PD) lainnya. Kesenjangan kemampuan teknis di antara aparatur berdampak pada kelancaran operasional penggunaan SIPD RI. Meskipun pelatihan telah diberikan, tidak semua pegawai dapat dengan cepat menyesuaikan diri terhadap sistem berbasis teknologi informasi yang memerlukan keahlian tertentu dalam pengelolaan data secara digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman yang belum merata di tingkat OPD memperberat beban kerja BPKD, khususnya dalam tahapan verifikasi dan validasi data keuangan. Koreksi manual yang dilakukan oleh BPKD tidak hanya meningkatkan risiko human error, tetapi juga memperlambat keseluruhan proses penyusunan laporan keuangan.

c. Lambatnya akses sistem

Selain kendala teknis dan pemahaman SDM, hambatan dalam penerapan SIPD RI di Kabupaten Rejang Lebong juga muncul dari segi aksesibilitas sistem. Sebagai sistem nasional yang digunakan secara terpusat oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia, SIPD RI harus menampung jutaan transaksi dan aktivitas secara bersamaan. Hal ini menyebabkan beban server pusat menjadi sangat tinggi, terutama pada jam-jam sibuk seperti menjelang batas waktu pelaporan bulanan, triwulanan, atau tahunan. Keterbatasan akses ini sangat menghambat efektivitas kerja aparatur. Ketika server pusat mengalami overload, pegawai tidak dapat melakukan input transaksi secara real-time maupun menarik laporan yang diperlukan untuk keperluan monitoring dan evaluasi. Kondisi ini memperpanjang durasi kerja, meningkatkan risiko kesalahan akibat keterburu-buruan, dan bahkan berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan daerah kepada pemerintah pusat.

3.3 Upaya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia

1. Mengoptimalkan Penyusunan SOP Internal untuk mengatasi keterbatasan Fitur SIPD RI

Sebagai upaya untuk mengatasi keterbatasan fitur dalam SIPD RI, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Rejang Lebong telah mengambil langkah strategis dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) internal. Penyusunan SOP ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang lebih terstruktur dan efisien dalam pengelolaan data keuangan daerah, sehingga meskipun sistem SIPD RI memiliki keterbatasan, proses administratif tetap berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik. SOP ini menjadi pedoman bagi setiap pegawai yang terlibat langsung dalam penginputan data, verifikasi, hingga penyusunan laporan keuangan. Melalui penerapan SOP ini, BPKD berharap dapat meningkatkan ketertiban dan efisiensi dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah. Sebagai contoh, SOP mengatur jadwal input data yang jelas sehingga proses pengolahan data tidak tertunda dan

menghindari tumpang tindih antar pegawai yang mungkin menyebabkan kebingungannya. Selain itu, SOP juga menekankan pentingnya adanya verifikasi data sebelum diserahkan ke sistem, yang dapat memperkecil kemungkinan kesalahan input yang bisa berujung pada perubahan yang memerlukan persetujuan pusat yang memakan waktu.

2. Mengoptimalkan Pemahaman Teknis Sumber Daya Manusia dalam Penggunaan SIPD RI

Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) yang efektif tidak hanya bergantung pada ketersediaan sistem yang baik, tetapi juga pada kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam operasionalisasi sistem tersebut. Salah satu hambatan yang sering muncul dalam implementasi SIPD RI adalah kurangnya pemahaman teknis dari para pegawai yang terlibat, baik di level administrasi maupun di level pengelolaan anggaran. Untuk mengatasi masalah ini, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Rejang Lebong telah mengambil berbagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemahaman teknis SDM yang terlibat dalam penggunaan SIPD RI. Salah satu langkah utama yang dilakukan oleh BPKD adalah melalui pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan teknis pegawai dalam mengoperasikan SIPD RI, serta memastikan bahwa mereka memahami mekanisme yang berlaku, baik dalam penginputan data, verifikasi, hingga penyusunan laporan keuangan. Langkah-langkah pelatihan yang dilakukan oleh BPKD meliputi pelatihan teknis yang mencakup pengoperasian sistem, pemahaman tentang alur kerja, serta prosedur-prosedur yang berlaku dalam SIPD RI. Selain itu, BPKD juga mengikutsertakan pegawai dalam berbagai bimbingan teknis (bimtek) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memberikan wawasan lebih lanjut terkait perkembangan terbaru dalam sistem. Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fitur-fitur SIPD RI, serta cara-cara yang efektif untuk menangani permasalahan teknis yang sering muncul.

3. Mengoptimalkan Infrastruktur dan Aksesibilitas Sistem Untuk Meningkatkan Kinerja SIPD RI

Salah satu tantangan besar dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) di Kabupaten Rejang Lebong adalah lambatnya akses sistem, yang sering terjadi terutama pada jam-jam sibuk atau saat puncak pelaporan. Keterlambatan akses ini menyebabkan beberapa kendala dalam pengelolaan keuangan daerah, yang berpotensi memengaruhi kinerja administrasi keuangan dan pelaporan keuangan daerah. Untuk mengatasi hambatan ini, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Rejang Lebong telah mengimplementasikan beberapa langkah strategis yang berkaitan dengan infrastruktur dan aksesibilitas sistem SIPD RI. Salah satu langkah tersebut adalah dengan menyiapkan mekanisme cadangan data manual. Mekanisme cadangan manual ini merupakan salah satu upaya untuk memastikan bahwa proses keuangan daerah tetap berjalan meskipun akses sistem SIPD RI terganggu. Dengan menggunakan prosedur manual, BPKD Kabupaten Rejang

Lebong dapat terus melaksanakan kegiatan administratif dan transaksi pembayaran yang sangat krusial tanpa harus menunggu perbaikan sistem. Setelah sistem kembali normal, data yang telah dicatat secara manual akan segera diinputkan ulang ke dalam SIPD RI, sehingga tidak ada proses yang tertinggal atau terlewat. Selain itu, dalam upaya mengoptimalkan infrastruktur sistem, BPKD juga telah bekerja sama dengan pihak pengelola sistem pusat untuk memastikan kapasitas server yang lebih besar dan perbaikan teknis pada infrastruktur yang mendukung operasional SIPD RI. Hal ini penting mengingat tingginya volume data yang harus diproses oleh sistem secara terpusat.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) di Kabupaten Rejang Lebong tergolong cukup efektif dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah. Hal ini tercermin dari tercapainya pelaporan anggaran secara digital, peningkatan efisiensi proses administrasi keuangan, serta integrasi sistem yang mulai berjalan baik. Namun demikian, efektivitas ini masih terhambat oleh tiga faktor utama, yakni keterbatasan fitur dalam sistem SIPD RI, pemahaman teknis aparatur yang belum merata, serta kendala aksesibilitas sistem akibat keterbatasan infrastruktur jaringan dan kapasitas server pusat. Temuan ini dibandingkan dengan sejumlah penelitian sebelumnya untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif.

Sama halnya dengan temuan penelitian Lidya Fitriani dan Agus Solikhin (2023) di Pemerintah Provinsi Jambi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SIPD RI berkontribusi positif terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian mereka menyebut bahwa penggunaan SIPD memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung keterpaduan data antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Temuan ini memperkuat hasil di Kabupaten Rejang Lebong, khususnya dalam dimensi pencapaian tujuan dan adaptasi, di mana sistem telah digunakan untuk menyusun laporan keuangan secara real-time dan mengurangi praktik manual. Keduanya menegaskan bahwa SIPD RI mampu menjadi tulang punggung dalam tata kelola keuangan yang lebih transparan dan efisien apabila didukung kesiapan internal.

Berbeda dengan temuan Yuladzul Fitrohtil Huda Firdaus dan M. Agus Cholik (2023) di Kota Bekasi, penelitian ini justru mencatat bahwa Rejang Lebong telah berhasil menggunakan SIPD RI secara penuh tanpa aplikasi pendamping sejak tahun 2024. Sementara itu, penelitian mereka menyebutkan bahwa di Kota Bekasi penerapan SIPD belum menunjukkan efektivitas yang berarti karena banyaknya kendala teknis, seperti keterbatasan fitur dan tingginya kompleksitas sistem yang menyebabkan frustrasi pengguna. Di Rejang Lebong, meskipun kendala serupa ditemukan, pemerintah daerah melakukan langkah mitigatif seperti menyusun SOP internal dan memberikan pelatihan teknis terbatas. Perbedaan ini menandakan bahwa efektivitas SIPD tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem itu sendiri, tetapi juga sangat bergantung pada komitmen dan adaptasi institusi pengguna.

Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Ahmad Fauzan Alfarishi dan Sukmini Hartati (2023) yang dilakukan di Kota Palembang. Penelitian tersebut menyoroti bahwa SIPD berfungsi secara optimal sebagai instrumen integratif untuk pengelolaan keuangan dan aset daerah, sekaligus meningkatkan aksesibilitas data antar unit kerja. Temuan ini sejalan dengan dimensi integrasi dalam penelitian ini, di mana SIPD telah digunakan oleh seluruh OPD di Rejang Lebong sebagai sistem

tunggal meskipun belum sepenuhnya merata dari segi pemahaman teknis antaroperator. Kesamaan ini menggarisbawahi pentingnya interkoneksi antarunit dan kemampuan adaptif dalam mendayagunakan sistem berbasis elektronik untuk manajemen fiskal daerah.

Namun, temuan ini menolak sebagian dari hasil penelitian I Ketut Aditya Teken dan Arina Romarina (2024) yang dilakukan di Kota Denpasar. Dalam penelitian mereka, disebutkan bahwa penerapan SIPD belum efektif karena minimnya pelatihan, kurangnya integrasi antarunit, dan ketergantungan pada aplikasi lain untuk pelaporan keuangan. Sebaliknya, di Kabupaten Rejang Lebong, meskipun pelatihan belum optimal, telah dilakukan penguatan melalui mekanisme SOP internal, penggunaan sistem secara penuh tanpa aplikasi pendamping, dan upaya memperkuat akses sistem dengan mekanisme data cadangan manual. Hal ini menunjukkan bahwa strategi lokal dalam menyikapi kelemahan sistem sangat menentukan tingkat efektivitas SIPD RI.

Sama halnya dengan temuan Tumija dan Akhmad Zakky Ramadhan (2023) di Kabupaten Gresik, penelitian ini juga menemukan bahwa perencanaan dan penganggaran dalam SIPD telah berjalan cukup efektif. Di Gresik, keberhasilan SIPD ditunjukkan dengan semakin akuratnya perencanaan anggaran dan keterpaduan informasi antara pemerintah daerah dan pusat. Temuan ini sejalan dengan kondisi di Rejang Lebong, di mana pencapaian target pelaporan triwulanan dan monitoring kinerja anggaran sudah mulai membaik sejak sistem digunakan secara penuh. Keduanya mengonfirmasi bahwa SIPD RI, meskipun memiliki keterbatasan teknis, mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah ketika diimbangi dengan perbaikan internal yang konsisten.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang didapatkan penulis di lapangan selama masa penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat hambatan yang dialami oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Rejang Lebong dalam penggunaannya. Faktor penghambat utama dalam penerapan SIPD RI tersebut antara lain keterbatasan fitur dalam sistem, pemahaman teknis sumber daya manusia yang belum optimal, dan lambatnya akses sistem. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, BPKD Kabupaten Rejang Lebong telah melakukan berbagai upaya, seperti mengoptimalkan penyusunan SOP internal untuk mengatasi keterbatasan fitur SIPD RI, meningkatkan pemahaman teknis sumber daya manusia dalam penggunaan sistem, serta memperbaiki infrastruktur dan aksesibilitas sistem guna meningkatkan kinerja SIPD RI.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu instansi pemerintah saja yakni Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Rejang Lebong sebagai model studi kasus yang dipilih.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada yakni Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Rejang Lebong beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agostino, D., Arnaboldi, M., & Lema, M. D. (2020). New development: COVID-19 as an accelerator of digital transformation in public service delivery. *Public Money & Management*, 41(1), 69–72. <https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1764206>
- Arif, M., & Firmansyah, D. (2024). *Analysis of the implementation and implications of the regional government information system (SIPD RI) in North Sulawesi*. *Journal of Contemporary Finance and Accounting Research*, 2(1), 45–58. <https://jurnal.ywnr.org/index.php/cfabr/article/view/253>
- Bernales-Vásquez, R., & Sánchez-Dávila, K. (2025). *Digitization of public financial management: Trends and applications in the scientific literature*. *Revista Científica de Sistemas e Informática*, 5(1). <https://revistas.unsm.edu.pe/index.php/rcsi/article/view/897>
- Cordella, A., & Paletti, A. (2019). *ICTs and value creation in public sector: Beyond efficiency and effectiveness*. *Information Polity*, 24(3), 243–260. <https://doi.org/10.3233/IP-190160>
- Ekaputra, N. D. (2021). Efektivitas penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan dokumen RKPD di Kabupaten Nganjuk. *Otonomi*, 21(1), 62–79. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/otonomi/article/view/1606>
- Hanifa, H., et al. (2024). Digital transformation of government administration: Enhancing public service accessibility and fiscal management transparency. *IAPA Proceedings Conference*, 1096–1108. <https://journal.iapa.or.id/proceedings/article/view/1096>
- Hardiansyah, R., & Jaffisa, T. (2024). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan transparan (Studi kasus pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 5194–5206. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/13709>
- Liamputtong, P. (2020). *Qualitative research methods*. Oxford University Press.
- Moleong, L. J. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). Analisis penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 109–116. <https://ojs.unimal.ac.id/jak/article/view/4577>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Jakarta: Kencana.
- Nurindahsari, R., Akuntansi, J., & Bandung, P. N. (2022). *The influence of implementation e-*

government information system on transparency and accountability of regional financial management (Case study on Bandung City Government). Indonesian Accounting Research Journal, 2(3), 251–257.

- Puron-Cid, G., Luna-Reyes, L. F., & Gil-Garcia, J. R. (2021). Information sharing in the public sector: A literature review and research agenda. *Government Information Quarterly, 38(1), 101545.* <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101545>
- Riyadi, S. (2020). *Administrasi publik dan reformasi birokrasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ruskarini, D. (2017). *Dasar-dasar metode penelitian kualitatif.* Surabaya: Cakra Ilmu.
- Simangunsong, F. (2017). *Metode penelitian sosial kualitatif.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Teken, I. K. A., & Romarina, A. (2024). Efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah Kota Denpasar. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, 4(2), 111–123.* <https://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm/article/view/4419/3389>
- Tumija, T., Hendra, A., & Sinurat, M. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Media Birokrasi, 5(1), 1–15.*
- Wijaya, S., Alfitri, M. H. T., & Salya, D. H. (2024). *The impact of electronic government policy on transparency and accountability in public services. International Journal of Science and Society, 6(2), 411–422.* <https://ijsoc.goacademica.com/index.php/ijsoc/article/download/1157/998>